

PENGARUH TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA

Sayifullah¹, Emmalian²

¹Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: sayifullah@untirta.ac.id

² Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ABSTRACT

The purpose of this research was to determine the influence and significant of labor agriculture sector and government expenditure agriculture sector either individually or together to Gross Domestic Product (GDP) agriculture sector in Indonesia. The method used in this research is Ordinary Least Square (OLS) for the period 1980-2013. The analysis technique used in this research is multiple linear regression testing normality test, the classical assumption (Multicollinearity, heterocedastity, autocorrelation and proceed with the analysis of OLS (Ordinary Least Square). Its become independent variables in this study were labor of agriculture sector and government expenditure of agriculture sector, while the dependent variable is the Gross Domestic Product (GDP) of agriculture sector. From the analysis conducted showed that the variables of labor in agriculture sector and government expenditure of agriculture sector has a significant influence on the Gross Domestic Product (GDP) of agriculture sector. Labor of agriculture sector influence (+) positive to Gross Domestic Product (GDP) of agriculture sector and government expenditure of agriculture sector influence (+) positive to Gross Domestic Product (GDP) of agriculture sector.

Keywords: *Gross Domestic Product (GDP) of Agriculture Sector, Labor of Agriculture Sector, Government Expenditure of Agriculture Sector.*

1.1.1 PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara agraris yang memberi konsekuensi pada perlunya perhatian pemerintah pada sektor pertanian yang kuat dan tangguh, oleh karena itu salah satu sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi adalah sektor pertanian. Indonesia merupakan negara pertanian yang artinya pertanian memegang peranan yang sangat penting dari keseluruhan perekonomian nasional, hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja pada sektor pertanian. Pertanian merupakan basis perekonomian Indonesia. Peran sektor pertanian di samping sebagai sumber penghasil devisa negara yang besar, juga merupakan sumber kehidupan bagi sebagian besar penduduk Indonesia, dan bila dilihat dari jumlah orang yang bekerja, maka sektor pertanian paling banyak menyerap tenaga kerja. Pengembangan bidang pertanian merupakan syarat mutlak untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, hal ini tercermin dari kebijakan pemerintah dimana pertanian tetap ditempatkan pada prioritas utama.

Perkembangan sektor pertanian di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat baik pertanian rakyat maupun yang dikelola perusahaan. Ini disebabkan

oleh sumberdaya alam (SDA) yang memadai dan jumlah penduduk (tenaga kerja) yang bekerja dalam sektor pertanian sangat banyak. Pemerintah mengusahakan agar tujuan pembangunan pertanian dapat tercapai secara aktif di sektor pertanian agar petani dapat meningkatkan pendapatannya melalui peningkatan produksi. Langkah yang ditempuh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan yaitu menganjurkan kepada masyarakat tani agar membudidayakan tanaman yang memiliki nilai ekonomis lebih baik dari yang telah diusahakan oleh petani sebelumnya dan mengadakan penyuluhan kepada petani agar memiliki kemampuan bercocok tanam yang baik dan efisien.

Menurut Tambunan dalam Amir (2011:3), setidaknya ada beberapa faktor yang bisa diungkapkan bahwa sektor pertanian menjadi penting dalam proses pembangunan, yaitu sektor pertanian menghasilkan produk-produk yang diperlukan sebagai input sektor lain, terutama sektor industri, seperti industri tekstil, industri makanan dan industri minuman, sebagai negara agraris maka sektor pertanian menjadi sektor yang sangat kuat dalam perekonomian pada tahap awal proses pembangunan. Populasi di sektor pertanian (pedesaan) membentuk suatu proporsi yang sangat besar. Hal ini menjadi pasar yang sangat besar bagi produk-produk dalam negeri, baik untuk barang-barang produksi maupun untuk barang-barang konsumsi, terutama produk pangan. Sejalan dengan hal tersebut, ketahanan pangan yang terjamin merupakan prasyarat kestabilan sosial dan politik, karena terjadi transformasi struktur dari sektor pertanian ke sektor industri, maka sektor pertanian menjadi sektor penyedia faktor produksi (terutama tenaga kerja) yang besar bagi sektor non pertanian (industri) dan sektor pertanian Indonesia merupakan sumber daya alam yang memiliki keunggulan komparatif bila dibandingkan bangsa lain. Proses pembangunan yang ideal mampu menghasilkan produk-produk pertanian yang memiliki keunggulan kompetitif terhadap bangsa lain, baik untuk kepentingan ekspor maupun substitusi impor.

Indonesia merupakan negara berbasis pertanian dan merupakan penghasil tanaman pangan yang tersebar di seluruh kawasan Indonesia. Predikat sebagai lumbung padi nasional mengukuhkan posisi Indonesia sebagai produsen tanaman pangan yang cukup potensial. Selain pertanian berbagai komoditi subsektor lainnya yang menjadi andalan yang dihasilkan oleh Indonesia.

Terdapat beberapa komoditi pertanian Indonesia yang menjadi komoditi unggulan. Komoditi-komoditi tersebut dikelompokkan ke dalam 5 subsektor yang meliputi subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan, subsektor perikanan, subsektor peternakan dan subsektor kehutanan. Pengembangan berbagai komoditi unggulan tersebut diharapkan mampu menciptakan kemajuan di sektor pertanian dan menunjang perekonomian Indonesia.

Sektor Potensial atau sektor unggulan dalam ilmu ekonomi regional disebut pula dengan sektor basis. Pengertian sektor basis (unggulan) pada dasarnya harus dikaitkan dengan suatu bentuk perbandingan, baik perbandingan dalam skala internasional, nasional maupun regional. Dalam kaitannya dengan lingkup internasional, suatu sektor dikatakan unggul apabila sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dari negara lain. Sedangkan dalam lingkup

nasional, menurut Wijaya (dalam Azhar, dkk, 2001, 2) suatu sektor dikatakan unggul jika sektor tersebut di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor sama yang dihasilkan oleh wilayah lain di pasar domestik atau nasional. Apabila sektor tersebut menjadi sektor basis (unggulan), maka sektor tersebut harus mampu mengekspor produknya ke daerah atau wilayah lain, sebaliknya apabila sektor tersebut menjadi sektor non basis (bukan unggulan), maka sektor tersebut harus mengimpor produk tersebut dari daerah lain. Sehingga dapat dipahami bahwa suatu sektor basis (unggulan) adalah sektor yang memiliki keunggulan komparatif.

Sektor pertanian Indonesia merupakan salah satu sektor ekonomi yang masih memiliki peranan penting bagi perekonomian bangsa, sehingga menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang mengekspor komoditi pertanian ke berbagai negara.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dinamika dalam perkembangan ekonomi jangka panjang bersamaan dengan ilmu pengetahuan teknologi, sumber daya alam dan kapasitas produksi. Pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja, terutama tenaga kerja sektor pertanian dianggap sebagai faktor positif dalam meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian.

Jumlah tenaga kerja yang besar dapat berarti menambah jumlah tenaga produktif. Dengan meningkatnya produktivitas tenaga kerja diharapkan akan meningkatnya produksi yang berarti akan meningkatkan pula PDB.

Dalam pertumbuhan ekonomi disuatu negara, tenaga kerja sektor pertanian memberikan andil yang besar bagi PDB sektor pertanian. Jumlah penduduk adalah salah satu faktor disuatu wilayah. Kenaikan jumlah penduduk dari waktu ke waktu mampu menjadi pendorong dan penghambat PDB. Besarnya jumlah penduduk akan menyebabkan besarnya tenaga kerja. Hal itu akan membuat kenaikan dalam jumlah barang yang diproduksi. Tetapi pada sisi yang lain besarnya jumlah penduduk akan menyebabkan terhambatnya pembangunan ekonomi jika pertambahan jumlah penduduk tersebut tidak diimbangi dengan pertumbuhan angkatan kerja.

Tenaga kerja (*manpower*) adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu Negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut (Mulyadi, 2003).

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang paling menentukan dalam proses pembangunan disuatu wilayah. Semakin besar jumlah tenaga kerja, lebih-lebih apabila disertai dengan keahlian yang cukup memadai, akan semakin pesat pula perkembangan pembangunan di wilayah tersebut.

Masalah pertumbuhan bukan lagi merupakan hal yang mendasar tetapi yang lebih penting adalah memikirkan bagaimana PDB bisa menciptakan lapangan kerja. Dalam pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang seperti Indonesia, ketenagakerjaan merupakan masalah yang rumit dan lebih serius

daripada masalah perubahan dalam distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan penduduk yang berpendapatan rendah.

Menurut Samuelson dan Nordhaus (2005) ada empat faktor sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tersebut adalah (1) sumber daya manusia (2) sumber daya alam (3) pembentukan modal (4) teknologi. Pengeluaran pemerintah berperan dalam pembentukan modal melalui pengeluaran pemerintah diberbagai bidang seperti sarana dan prasarana.

Todaro (2004:18) menyebutkan bahwa pemerintah harus diakui dan dipercaya untuk memikul peranan lebih besar dan yang lebih menentukan didalam upaya pengelolaan perekonomian nasional atau daerah. Melalui pengeluaran belanja pemerintah dapat mengalokasikan dana tersebut guna membiayai penyediaan berbagai fasilitas sosial yang enggan dilakukan oleh pihak swasta.

Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran menyatakan bahwa $Y=C+I+G+X-M$. Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional (dalam arti luas), sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel-variabel ruas kanan disebut permintaan agregat. Variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah (government expenditure). Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamatinya dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan agregat atau pendapatan nasional. Dengan itu dapat dianalisis seberapa penting peranan pemerintah dalam perekonomian nasional.

Pengeluaran pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan PDB, pengeluaran pemerintah yang proposional akan meningkatkan PDB, pengeluaran pemerintah yang boros akan menghambat PDB. Tetapi pada umumnya pengeluaran pemerintah membawa dampak positif bagi pertumbuhan (Marganda dan Sirojulizam 2009).

Darma Rika dan Susi (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah khususnya dalam pengeluaran investasi, berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sering dikatakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat memainkan peran sebagai salah satu penggerak utama (prime mover) dalam perekonomian, sehingga ketika perekonomian sedang mengalami kelemahan akibat adanya resesi ekonomi yang menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan masyarakat dalam melakukan kegiatan perekonomian, pemerintah melalui kebijaksanaan yang dimiliki dapat tampil menyelamatkan keadaan dengan memperbesar pengeluaran pemerintah melalui anggaran belanja defisit, atau sebaliknya. Dalam setiap sistem perekonomian, baik kapitalis atau sistem perekonomian sosialis pemerintah senantiasa mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian.

Apabila pengeluaran investasi swasta tidak dapat mendorong kenaikan pada Produk Domestik Bruto (PDB), maka pengeluaran pemerintah dapat menggantikannya (Nopirin, 2007:87). Keynes juga mengemukakan, investasi nyata (real investment) merupakan kunci utama untuk meningkatkan PDB, misalnya dalam proyek infrastruktur baru. Menurut Keynes investasi ini akan memberikan efek positif bagi penciptaan lapangan kerja dan selanjutnya menghasilkan kesejahteraan melalui *multiplier effect* (Arif Budiman, 2000:31).

Peran sektor pertanian di samping sebagai sumber penghasil devisa negara yang besar bagi pertumbuhan ekonomi, juga merupakan sumber kehidupan bagi sebagian besar penduduk Indonesia yang bekerja sebagai petani.

Peranan pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan sangat diharapkan untuk segera mencari jalan keluar dengan merumuskan langkah-langkah yang sistematis dan strategis sebagai upaya penanganan untuk meningkatkan PDB sektor pertanian di Indonesia. Faktor tenaga kerja sektor pertanian dan pengeluaran pemerintah sektor pertanian merupakan faktor yang sangat penting yang harus diperhatikan perkembangannya, karena pengaruh dari kedua faktor tersebut sangat besar dalam meningkatkan PDB sektor pertanian di Indonesia.

1.1.2 Tinjauan Literatur

Peran sektor pertanian di samping sebagai sumber penghasil devisa negara yang besar bagi pertumbuhan ekonomi, juga merupakan sumber kehidupan bagi sebagian besar penduduk Indonesia yang bekerja sebagai petani. Peranan pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan sangat diharapkan untuk segera mencari jalan keluar dengan merumuskan langkah-langkah yang sistematis dan strategis sebagai upaya penanganan untuk meningkatkan PDB sektor pertanian di Indonesia. Faktor tenaga kerja sektor pertanian dan pengeluaran pemerintah sektor pertanian merupakan faktor yang sangat penting yang harus diperhatikan perkembangannya, karena pengaruh dari kedua faktor tersebut sangat besar dalam meningkatkan PDB sektor pertanian di Indonesia.

PDB merupakan nilai barang dan jasa yang di produksi di wilayah suatu negara tanpa membedakan kewarganegaraan pada suatu periode waktu tertentu. Dengan demikian warga negara yang bekerja di negara lain, pendapatannya tidak dimasukkan ke dalam PDB. Sebagai gambaran PDB Indonesia baik oleh warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) yang ada di Indonesia tetapi tidak diikutsertakan WNI di luar negeri (Herlambang, 2001:22).

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai pasar total output suatu negara. PDB merupakan nilai pasar semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu periode waktu tertentu oleh faktor-faktor produksi yang beralokasi dalam suatu negara (Case & Fair, 2007:21). Sedangkan menurut Sukirno (2011:34) Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut dan negara asing.

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah pendapatan total dan pengeluaran total nasional atas output barang dan jasa. Produk domestik bruto sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian. Angka PDB merangkum aktivitas ekonomi suatu negara dalam satuan mata uang pada periode tertentu (Mankiw, 2007:12).

Definisi lain menyebutkan PDB merupakan Nilai Tambah Bruto (NTB) atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam suatu wilayah atau region dalam suatu periode tertentu. Nilai Tambah Bruto (NTB) adalah nilai produksi bruto dari barang dan jasa tersebut dikurangi seluruh biaya antara yang dikeluarkan.

Produk Domestik Bruto diyakini sebagai indikator ekonomi terbaik dalam menilai perkembangan ekonomi suatu negara. Perhitungan pendapatan nasional ini mempunyai ukuran makro utama tentang kondisi suatu negara. Pada umumnya perbandingan kondisi antar negara dapat dilihat dari pendapatan nasionalnya sebagai gambaran. Bank Dunia menentukan apakah suatu negara berada pada kelompok negara maju atau berkembang melalui pengelompokan besarnya PDB, dan PDB suatu negara sama dengan total pengeluaran atas barang dan jasa dalam perekonomian (Herlambang, 2001:16).

Menurut Simanjuntak (1998) tenaga kerja atau man power terdiri atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja atau labor force terdiri dari (1) golongan yang bekerja, dan (2) golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari (1) golongan yang bersekolah (2) golongan yang mengurus rumah tangga dan (3) golongan lain-lain atau penerima pendapatan.

Angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang aktif secara ekonomis. Angkatan kerja terdiri dari penduduk usia kerja yang menawarkan tenaga kerjanya dan berhasil mendapatkan (employed) dan penduduk usia kerja yang menawarkan tenaga kerjanya tetapi belum berhasil mendapatkan pekerjaan (unemployed), serta penduduk yang mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja (Haryani, 2002).

Tenaga kerja (manpower) adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu Negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut (Mulyadi, 2003).

Menurut Mangkoesubroto (1999) pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Pengeluaran pemerintah merupakan instrumen untuk mengukur besarnya peran pemerintah maupun peran pihak swasta. Selain itu pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebagai penentu jumlah pengeluaran agregat maupun penentu pertumbuhan GNP riil dalam jangka pendek. Pengeluaran pemerintah atas barang maupun jasa dikelompokkan ke dalam dua kelompok yaitu, konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah. Yang termasuk dalam golongan yang pertama (konsumsi pemerintah) adalah pembelian ke atas barang dan jasa yang akan dikonsumsi, seperti membayar gaji guru sekolah, membeli alat-alat tulis, dan kertas untuk digunakan dan membeli bensin untuk kendaraan pemerintah. Sedangkan investasi pemerintah meliputi pengeluaran untuk membangun prasarana seperti jalan, sekolah, rumah sakit dan irigasi (Sukirno,2010).

Hukum Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Menurut (Mangkoesubroto, 1999) mengapa peranan pemerintah semakin besar, disebabkan pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Kelemahan hukum Wagner adalah karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Wagner mendasarkan pandangannya dengan teori organis mengenai pemerintah (organic theory of the state) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

1.1.3 Pengembangan Hipotesis

Hubungan Antara Tenaga Kerja Sektor Pertanian Terhadap Produk Domestik Bruto Sektor Pertanian

Penduduk merupakan unsur penting dalam meningkatkan produksi dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Penduduk memegang peranan penting karena menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan, tenaga usahawan yang diperlukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi. Disamping pertambahan jumlah penduduk mengakibatkan bertambah dan makin kompleknya kebutuhan (Sadono Sukirno, 2010).

Todaro (2004) menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan tenaga kerja dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Meski demikian hal tersebut masih dipertanyakan apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang cepat benar-benar akan memberikan dampak positif atau negatif dari pembangunan ekonominya. Selanjutnya dikatakan bahwa pengaruh positif atau negatif dari pertumbuhan penduduk tergantung pada kemampuan sistem perekonomian negara tersebut dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan pertambahan tenaga kerja tersebut.

Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya input dan faktor penunjang seperti kecakapan manajerial dan administrasi. Dalam model sederhana tentang pertumbuhan ekonomi, pada umumnya pengertian tenaga kerja diartikan sebagai angkatan kerja yang bersifat homogen. Menurut Lewis (1954) dalam Todaro (2004) angkatan kerja yang homogen dan tidak terampil dianggap bisa bergerak dan beralih dari sektor tradisional ke sektor modern secara lancar dan dalam jumlah terbatas. Keadaan demikian, penawaran tenaga kerja mengandung elastisitas yang tinggi. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja (dari sektor tradisional) bersumber pada ekspansi kegiatan sektor modern. Dengan demikian salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja.

Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian Terhadap Produk Domestik Bruto Sektor Pertanian

Dumairy (2001) menyebutkan bahwa pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Pengeluaran-pengeluaran itu bukan saja untuk menjalankan roda pemerintah sehari-hari, akan tetapi juga membiayai kegiatan perekonomian. Bukan berarti pemerintah turut berbisnis, melainkan dalam arti pemerintah harus menggerakkan dan merangsang kegiatan ekonomi secara umum. Pemerintah yang baik harus senantiasa berusaha menghindari dan memperbaiki kegagalan pasar demi tercapainya efisiensi. Pemerintah juga harus memperjuangkan pemerataan melalui program perpajakan dan redistribusi pendapatan untuk kelompok atau golongan masyarakat tertentu. Pemerintah harus menggunakan perangkat perpajakan, pembelanjaan dan peraturan moneter untuk menggapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, mengurangi laju inflasi dan pengangguran serta memacu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Pengeluaran pemerintah adalah seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan

pelayanan kepada masyarakat. Pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah atau wilayah (Sadono Sukirno,2010). Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.

1.1.4 METODE PENELITIAN

Untuk mencapai tujuan penelitian dalam menganalisis PDB sektor pertanian Indonesia, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif terdiri dari data PDB sektor pertanian, data jumlah tenaga kerja sektor pertanian dan data pengeluaran pemerintah sektor pertanian. Data yang digunakan sebagai observasi adalah data time series yaitu data yang nilai variabelnya disusun menurut urutan waktu yaitu berupa data tahunan selama 34 tahun, dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2013 yang mewakili kawasan Indonesia.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) yang menggunakan data time series yaitu data yang nilai variabelnya disusun menurut urutan waktu yaitu berupa data tahunan selama 34 tahun, dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2013 yang mewakili kawasan Indonesia.

Persamaan ekonometrika dari model di atas adalah sebagai berikut:

$$PDB_{Agr} = \beta_0 + \beta_1 L_{Agr_t} + \beta_2 GE_{Agr_t} + \mu_t$$

Keterangan:

PDBagr=	Produk Domestik Bruto Sektor Pertanian
Lagr =	Tenaga Kerja Sektor Pertanian
GEagr =	Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian
β_0 =	Konstanta
β_1, β_2 =	koefisien regresi variabel bebas
μ =	Term of error
t =	Unit time-series sebanyak t (t = Tahun 1980-2013)

1.1.5 HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengujian dari variabel penelitian yang ditetapkan, maka diperoleh nilai koefisien sebagai berikut:

$$PDB_{Agr} = \beta_0 + \beta_1 L_{Agr} + \beta_2 GE_{Agr} + \mu_i$$

$$PDB_{Agr} = -145385.5 + 0.008629L_{Agr} + 8.097747GE_{Agr} + \mu_i$$

$$SE = (20556.10) (0.000598) (0.587338)$$

$$t\text{-stat} = (-7.072622) (14.43664) (13.78720)$$

Probabilitas = (0,0000) (0,0000) (0,0000)

F-stat = 472.2651

Prob F-stat = 0,000000

R2 = 0.971209

Hasil regresi berganda dengan hasil dimana variabel tenaga kerja sektor pertanian memiliki koefisien 0.008629 dengan probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari alpha yaitu $0,0000 < 0,05$ artinya tenaga kerja sektor pertanian berpengaruh positif terhadap PDB sektor pertanian di Indonesia. Tenaga kerja sektor pertanian memiliki nilai koefisien yang bertanda positif, yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 jiwa pada tenaga kerja sektor pertanian akan meningkatkan PDB sektor pertanian di Indonesia sebesar 0.008629.

Hasil regresi berganda dengan hasil dimana variabel pengeluaran pemerintah sektor pertanian memiliki koefisien 8.097747 dengan probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari alpha yaitu $0,0000 < 0,05$ artinya pengeluaran pemerintah sektor pertanian berpengaruh positif terhadap PDB sektor pertanian di Indonesia. Pengeluaran pemerintah memiliki nilai koefisien yang bertanda positif, yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 miliar rupiah pada pengeluaran pemerintah sektor pertanian akan meningkatkan PDB sektor pertanian di Indonesia sebesar 8.097747.

Pengaruh Tenaga Kerja Sektor Pertanian Terhadap PDB Sektor Pertanian di Indonesia

Tenaga kerja sektor pertanian sangat berperan penting bagi peningkatan PDB sektor pertanian. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa nilai koefisien tenaga kerja sektor pertanian dengan PDB sektor pertanian adalah berbanding positif atau searah. Sesuai dengan hasil estimasi dengan metode OLS (Ordinary Least Square) dengan bantuan program *eviews8* menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja sektor pertanian memiliki hubungan yang berbanding searah dengan PDB sektor pertanian, yaitu jika tenaga kerja sektor pertanian meningkat maka PDB sektor pertanian akan naik.

Pada persamaan model regresi diperoleh nilai uji t untuk variabel X1 (tenaga kerja sektor pertanian) mempunyai nilai sebesar $0,0000 < 0,05$ maka variabel X1 (tenaga kerja sektor pertanian) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (PDB sektor pertanian). Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel tenaga kerja sektor pertanian mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dalam meningkatkan PDB sektor pertanian di Indonesia.

Hal ini juga searah dengan Teori klasik Adam Smith. Teori ini menganggap bahwa manusia sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Dalam hal ini teori klasik Adam Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi.

Kaum klasik percaya bahwa perekonomian yang dilandaskan pada kekuatan mekanisme pasar akan selalu menuju keseimbangan (*equilibrium*). Dalam posisi keseimbangan semua sumber daya, termasuk tenaga kerja, akan digunakan secara penuh (*full-employed*). Dengan demikian di bawah sistem yang didasarkan pada mekanisme pasar tidak ada pengangguran. Kalau tidak ada yang bekerja, daripada tidak memperoleh pendapatan sama sekali, maka mereka bersedia bekerja dengan tingkat upah yang lebih rendah. Ketersediaan

untuk bekerja dengan tingkat upah lebih rendah ini akan menarik perusahaan untuk memperkerjakan mereka lebih banyak.

Pengaruh positif antara tenaga kerja sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi sektor pertanian juga didukung dengan penelitian terdahulu oleh Arief Kurniawan (2008) yang berjudul "Analisis Pengaruh PDB Sektor Pertanian Dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Temanggung". Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB sektor pertanian di Kabupaten Temanggung.

Pembuktian empiris penelitian terdahulu lainnya yaitu berasal dari Makmun dan Akhmad Yasin (2003) meneliti tentang "Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDB Sektor Pertanian di Indonesia". Hasil penelitiannya variabel tenaga kerja berpengaruh positif terhadap PDB sektor pertanian di Indonesia.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian Terhadap PDB Sektor Pertanian di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pertanian pada periode 1980 sampai dengan tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB sektor pertanian di Indonesia. Sesuai dengan hasil estimasi dengan metode OLS (Ordinary Least Square) dengan bantuan program eviews8 menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor pertanian memiliki hubungan yang berbanding searah dengan PDB, yaitu jika jumlah pengeluaran pemerintah sektor pertanian meningkat maka PDB sektor pertanian akan naik.

Pada persamaan model regresi diperoleh nilai uji t untuk variabel X2 (pengeluaran pemerintah sektor pertanian) mempunyai nilai sebesar $0,0000 < 0,05$ maka variabel X2 (pengeluaran pemerintah sektor pertanian) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (pertumbuhan ekonomi). Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor pertanian mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dalam meningkatkan PDB sektor pertanian di Indonesia.

Pengeluaran pemerintah untuk overhead sosial dan ekonomi memberikan kesempatan kerja, menaikkan pendapatan, dan lebih daripada semua itu, meningkatkan kapasitas perekonomian. Jika pemerintah mulai melaksanakan pekerjaan umum seperti pembangunan jalan raya, jalan kereta api, proyek pembangkit tenaga, terusan, dan sebagainya, hal itu akan memberikan pekerjaan kepada penganggur. Penyediaan seperti itu membantu meningkatkan produksi, perdagangan dan usaha bisnis.

Menurut Jhingan (2003) peranan belanja pemerintah dalam pembangunan ekonomi terletak di dalam peningkatan laju pertumbuhan perekonomian, penyediaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan standar kehidupan, penurunan kesenjangan pendapatan dan kemakmuran, dalam mendorong inisiatif dan usaha swasta, dan dalam mewujudkan keseimbangan regional di dalam perekonomian.

Sesuai dengan teori Rostow dan Musgrave bahwa pengeluaran pemerintah untuk investasi digunakan guna memacu pertumbuhan ekonomi, Pengeluaran investasi tersebut ditujukan untuk pengadaan sarana maupun prasarana publik seperti infrastruktur transportasi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

Pengaruh positif antara pengeluaran pemerintah terhadap PDB sektor pertanian juga didukung dengan penelitian terdahulu oleh Christi Stella Manoi (2015) yang berjudul "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB Sektor Pertanian di Provinsi Sulawesi Utara.". Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap PDRB sektor pertanian.

1.1.6 SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh tenaga kerja sektor pertanian dan pengeluaran pemerintah sektor pertanian terhadap PDB sektor pertanian di Indonesia, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengujian parsial yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (tenaga kerja sektor pertanian dan pengeluaran pemerintah sektor pertanian) secara individu terhadap variabel dependen (PDB sektor pertanian) di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa:
 - a) Variabel tenaga kerja sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB sektor pertanian di Indonesia. Artinya setiap kenaikan pada tenaga kerja sektor pertanian akan menyebabkan kenaikan pada PDB sektor pertanian di Indonesia dan sebaliknya, setiap penurunan pada tenaga kerja sektor pertanian akan menyebabkan penurunan pada PDB sektor pertanian di Indonesia.
 - b) Variabel pengeluaran pemerintah sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB sektor pertanian di Indonesia. Artinya setiap kenaikan pada pengeluaran pemerintah sektor pertanian akan menyebabkan kenaikan pada PDB sektor pertanian di Indonesia dan sebaliknya, setiap penurunan pada pengeluaran pemerintah sektor pertanian akan menyebabkan penurunan pada PDB sektor pertanian di Indonesia.
2. Berdasarkan hasil pengujian simultan yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen (tenaga kerja sektor pertanian dan pengeluaran pemerintah sektor pertanian) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (PDB sektor pertanian), dapat disimpulkan bahwa variabel tenaga kerja sektor pertanian dan pengeluaran pemerintah sektor pertanian secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PDB sektor pertanian di Indonesia.

Saran

Dari hasil penelitian yang berdasarkan hasil penelitian, adapun beberapa saran yang ingin disampaikan penulis, sebagai berikut:

1. Saran Bagi Guna Laksana :
 - a) Sektor pertanian masih tetap merupakan sumber kesempatan kerja yang potensial. Upaya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja perlu terus dilakukan antara lain melalui perbaikan sistem pengupahan, mobilitas dan informasi tenaga kerja, serta pengembangan agroindustri dan kesempatan kerja di luar sektor pertanian. Kontribusi tenaga kerja dinilai menentukan kinerja usaha tani padi yang bersifat padat tenaga kerja. Kelangkaan tenaga kerja dan peningkatan upah secara tidak terkendali perlu dicegah. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh tani, perlu diupayakan peningkatan bagian harga yang diterima petani dan pengendalian harga barang konsumsi dan sarana produksi. Bagi rumah tangga buruh

tani, di samping perlu mempertahankan tingkat upah yang wajar, juga diperlukan upaya yang bersifat inklusif dan integratif dalam peningkatan kesejahteraannya.

- b) Peran pengeluaran pemerintah khususnya dalam sektor pertanian memiliki pengaruh positif terhadap PDB sektor pertanian di Indonesia. Untuk itu diharapkan pengeluaran pemerintah sektor pertanian perlu untuk ditingkatkan. Disarankan bagi pemerintah agar pengeluaran tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal dan efisien, dengan mengutamakan pembiayaan ke arah peningkatan dan pemeliharaan pada sektor pertanian guna menunjang kelancaran kegiatan ekonomi khususnya pada PDB sektor pertanian.

2. Saran Bagi Pengembangan Ilmu:

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan literatur bagi peneliti yang akan melakukan penelitian terkait tentang pengaruh dari tenaga kerja sektor pertanian dan pengeluaran pemerintah sektor pertanian terhadap PDB sektor pertanian di Indonesia.
- b) Penelitian selanjutnya diharapkan agar melakukan pengembangan-pengembangan model maupun metode analisis, serta menambahkan variabel-variabel lain yang mempengaruhi PDB sektor pertanian di Indonesia dengan harapan dapat lebih memperkaya isi dan cakupan penelitian.
- c) Keterbatasan jumlah variabel pada penelitian ini yang hanya menggunakan dua variabel bebas dan satu variabel terikat, hendaknya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat menambah variabel lain yang memengaruhi PDB sektor pertanian di Indonesia dengan harapan dapat lebih memperkaya isi dan cakupan penelitian.

1.1.7 REFERENSI

Ardi Raharjo, 2006, Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta dan AngkatanKerjaTerhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 1982-2003 (Studi Kasus di Kota Semarang)

Arief Budiman, 2000, Teori Ekonomi Pembangunan, Jakarta, PT. Gramedia Pustakan Utama.

Arief Hadiono, 2001, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomidi Provinsi Banten

Arief Kurniawan, 2008, Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian Dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Temanggung Tahun 2002-2006, Jawa Tengah.

Badan Pusat Statistik, 2013, Dalam Angka Tahun, (berbagai tahun) penerbitan,BPS Indonesia

- Badan Pusat Statistik, 2014, Dalam Angka Tahun, (berbagai tahun) penerbitan, BPS Indonesia
- Bank Indonesia, 2003, Dalam Angka tahun, (berbagai tahun) penerbitan, Bank Indonesia
- Barro, R., 2007. Annual Average Growth Rates of Real Per Capita GDP. *Journal of Economy Development* 98, S103–S125.
- Boediono, 1999. Teori Pertumbuhan Ekonomis seri sinopsis, Edisi Pertama, Cetakan keenam, BPFE, Jakarta.
- Christi Stella Manoi, 2015, Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB Sektor Pertanian, 2005-2012, Sulawesi Utara.
- Daniel, 2002. Analisis Pengaruh Sektor Pertanian Terhadap Pembangunan Indonesia Tahun 1980-2000, Jakarta.
- Darma Rika & Susi, 2011. Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional : Studi Kasus Data Panel di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol.12 No.1: 27-36.
- Davey, K.J, 1988, Pembiayaan Pemerintah Daerah Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga, terjemahan, UI-Press.
- Djojohadikusuma S, 1994, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan, LP3ES, Jakarta
- Dumairy, 2001, Perekonomian Indonesia, Cetakan Ketiga, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Dwi Suryanto, 2011, Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Subosukawonosraten tahun 2004-2008, Jawa Tengah.
- Gujarati, D. 2010, *Essential of Econometrics*, McGraw-Hill, Inc. Second Edition, London.
- Glasson, J, 1997, *An Introduction to Regional Planning*, London Hutchinson Educational

Haryani Rustam, 2002, Peran Tenaga Kerja dalam Perekonomian, Ekonomi Indonesia Vol. XLV No. 8

Hyman, David N, 1996, Public Finance : A Contemporary Application of Theory to Policy, The Dryden Press, Harcourt Brace College, Publisher.

Jhingan, 2010, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, diterjemahkan oleh D.Guritno, Edisi ke Tujuh, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money, (1883-1946).

Kamaluddin, 1998, Peranan Utama Sektor Pertanian Dalam Pembangunan, Ekonomi Pembangunan Vol. XVII

Kruger and Lindahl, 2009, GDP Growth Economic and Level of Real Per Capita Income. Journal of Economy Development 99, S105–S127.

Kuznet, S, 1955, Economic Growth and Inequalities, American Economic Review

Lee, Robert D and Ronald W Johnson, 1998, Public Budgeting System 6th Edition. AN Asper Publication Gaitherring Maryland.

Lewis, J.W, 1954, The Social Limits of Political Change dalam Modernization by Design, CH. Morse, e.a, Cornell University Press

Lincoln Arsyad, 1999, Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Yogyakarta, BPFE-UGM.

Mandala Manurung & Prathama Rahardja, 2008. Teori Ekonomi Suatu Pengantar, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Mangkoesobroto, Guritno. 1999. Ekonomi Publik, BPFE, Edisi 3, Yogyakarta.

Mankiw, Gregory N. 2007. Makro ekonomi. Edisi VI. Alih Bahasa Fitria Liza dan Imam Nurmawan. Jakarta : Erlangga.

Marganda & Sirojulizam. 2009. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi , Jawa Barat.

- Meier, 1989, *Local Government Financial Management*, Hertfordshire : ICOSA Publishing.
- Michael P. Todaro, 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, terjemahan, cetakan keempat, Jakarta, Ghalia, Indonesia.
- Mohamad Erhan Wibowo, 2014. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pertanian Terhadap Tingkat Kemiskinan tahun 2007-2012*, Jawa Tengah.
- Mudrajad Kuncoro, 1997, *Ekonomi Pembangunan, Teori, masalah dan kebijakan*, Cetakan pertama, Unit penerbitan dan percetakan akademi manajemen perusahaan YKPN, Yogyakarta.
- Mulyadi, 2003 " *Analisis Pengaruh Aglomerasi, Tenaga Kerja, Jumlah Penduduk, Dan Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal*".
- Musgrave, Richard A and Peggy B. Musgrave, 1989, *Public Finance in Theory and Practice*, Mc Graw-Hill
- Nopirin, 2007. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro & Mikro*, BPFE, Yogyakarta.
- Republik Indonesia, 2003. *Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*.
- Robert Solow and Trevor Swan S. 1956. *Fiscal Structure and Economic Growth at the State and Local Level*, *Public Finance Review*, Vol. 25 No. 3, 213-237.
- Sadono Sukirno, 2010, *Ekonomi Pembangunan Proses masalah dan Dasar Kebijakan*, cetakan ketiga, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Samuelson, P.A, & Nordhaus, W, D. 2005. *Ilmu Makroekonomi*, Edisi ketujuhbelas, alih bahasa Gretta dkk. Jakarta : PT Media Global Edukasi.
- Sayekti, D, Suindyah, 2008, *Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2000-2004*, Jawa Timur.
- Simanjuntak, DJ Isman, 1998, *Persoalan Pokok Sehubungan dengan Tenaga Kerja Indonesia*, Seminar di UAJ Yogyakarta.

Sitanggang dan Nachrowi, 2004. *Ekonomi Makro ; Teori Analisis dan Kebijakan*, Gramedia, Jakarta.

Soekartawi. 1996, *Analisis Pengaruh Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*, Jawa Tengah.

Soetrisno. 2003. *Pertumbuhan Ekonomi Orde baru*, Jurnal Media Riset Ekonomi, Vol. 1 No. 2 : 109-124, Jakarta, Indonesia.

Subandi, 2011. *Ekonomi Pembangunan Cetakan Kesatu*, Alfabeta, Bandung.

Tulus Tambunan, 2011, *Perekonomian Indonesia, Teori dan Temuan Empiris*, Jakarta, Ghalia, Indonesia.